

BAB II

***WOLF WARRIOR DIPLOMACY* SEBAGAI BAGIAN TRANSFORMASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI DI ERA XI JINPING**

Langkah pemerintah China dalam menggunakan strategi *Wolf Warrior Diplomacy* menjadi pendekatan yang menandai perubahan arah dan sikap Beijing terhadap isu-isu internasional. Pada bab ini, akan dijabarkan secara rinci terkait transformasi kebijakan luar negeri China di masa pemerintahan Xi Jinping dan bagaimana reaksi negara-negara lain serta persepsinya terhadap China atas meningkatnya Beijing sebagai kekuatan ekonomi global.

2.1 Transformasi Kebijakan Luar Negeri China di Masa

Pemerintahan Xi Jinping

Sejak naiknya Xi Jinping sebagai pemimpin tertinggi China, negara tersebut mengalami transformasi dalam kebijakan luar negerinya. Transformasi tersebut menandai adanya pergeseran paradigma dari pendekatan kebijakan luar negeri konservatif pada masa pemerintahan Deng Xiaoping, yang mana pada awalnya, China memiliki pendekatan kebijakan luar negeri *low profile* dengan fokus pada Pembangunan domestik atau yang dikenal sebagai *taoguang yanghui*. Pendekatan ini dipilih Deng Xiaoping dengan anggapan bahwa konfrontasi terbuka dengan kekuatan besar akan mengganggu proyek modernisasi ekonomi

China. Selain itu, pendekatan ini merupakan respons terhadap kerentanan China akibat sanksi Barat yang diberlakukan pasca Aksi Protes Tiananmen tahun 1989 (Zhao, 2013).

Xi Jinping kemudian mengubah arah kebijakan luar negeri China bergerak menuju pendekatan yang jauh lebih asertif dan proaktif, yang sering diistilahkan sebagai "*Fen Fa You Wei*" (berjuang untuk pencapaian) atau "*You Suo Zuo Wei*" (membuat pencapaian). Perubahan ini menandai era baru dalam pendekatan kebijakan luar negeri China, yang mana menunjukkan bagaimana Beijing berupaya untuk berperan aktif dan menonjol dalam panggung internasional (Sørensen, 2015). Perubahan ini tidak hanya bersifat formalitas, melainkan mencerminkan keyakinan baru di kalangan elite Partai Komunis China (PKC) bahwa China telah mencapai status kekuatan besar yang tidak lagi perlu menyembunyikan ambisinya. Xi Jinping melihat bahwa peningkatan kekuatan China yang berkelanjutan sejak dekade 1990-an menciptakan peluang baru untuk memainkan peran yang lebih dominan dalam tatanan internasional (Zhao, 2013).

Inti dari pergeseran ini adalah visi Xi Jinping tentang "*Chinese Dream*" (*Zhongguo Meng*), yang berpusat pada "Peremajaan Besar Bangsa China" (*Great Rejuvenation of the Chinese Nation*). Dalam filosofinya, Xi Jinping melihat bahwa industrialisasi yang terjadi di China dan kesuksesan dalam menyelenggarakan Olimpiade Beijing menjadi salah satu prestasi yang bisa dibanggakan oleh seluruh masyarakat China sehingga negara

tersebut optimis akan masa depan yang lebih cerah melalui visi dari Partai Komunis China. Pergeseran ini juga merupakan solusi yang diberikan oleh Partai Komunis China atas tantangan yang dihadapi oleh negara tersebut selama 150 tahun terakhir dan berbagai kegagalan seperti *Great Leap Forward* dan *Cultural Revolution* (Ferdinand, 2016). Visi ini berupaya ini menempatkan China pada posisi sentral dalam tatanan dunia dan menuntut agar kebijakan luar negeri secara aktif mendukung pencapaian tujuan nasional ini, yang mana berfokus pada pencapaian prestasi melalui diplomasi yang lebih asertif dan proaktif dengan peningkatan kapasitas struktural.

Gagasan konsep *Chinese Dream* membawa angin besar sebagai narasi besar yang berupaya merangkum transformasi kebijakan luar negeri China di bawah Xi Jinping. Konsep ini menawarkan harapan baru yang relatif bebas dari kekakuan retorika ideologi lama (Ferdinand, 2016). Oleh karena itu, *Chinese Dream* tidak hanya merepresentasikan respons terhadap aspirasi publik, tetapi juga menjadi instrumen legitimasi kekuasaan yang memungkinkan Xi Jinping untuk menyeimbangkan antara mobilisasi harapan kolektif dan penegasan kontrol partai yang lebih kuat.

Operasionalisasi "*Chinese Dream*" dalam kebijakan luar negeri mencakup tiga elemen utama: pertama, konsolidasi kekuasaan regional melalui peningkatan pengaruh ekonomi dan diplomasi di kawasan sekitar; kedua, pengembangan kekuatan militer untuk mendukung klaim teritorial dan mencegah intervensi eksternal; dan ketiga, promosi model

pemerintahan China sebagai alternatif terhadap sistem liberal Barat. Ketiga elemen ini saling terkait dan saling memperkuat dalam strategi komprehensif yang dirancang untuk mentransformasi posisi China dalam sistem internasional (Boc, 2015).

Ini juga ditunjukkan melalui faktor yang mendorong perubahan arah kebijakan luar negeri China di bawah Xi Jinping. Perubahan ini didorong oleh dua faktor utama: akumulasi kekuatan ekonomi dan militer China yang masif, serta persepsi bahwa tatanan internasional yang dipimpin Amerika Serikat sedang mengalami kemunduran. Di bawah Xi Jinping, kebijakan luar negeri menjadi lebih terpusat dan dipersonalisasi, dengan pemikiran Xi Jinping tentang diplomasi. Pemikiran ini memberikan legitimasi ideologis bagi kebijakan luar negeri yang bersifat lebih ambisius dan asertif. Dengan demikian, China di bawah Xi Jinping tidak lagi hanya beradaptasi dengan tatanan global, tetapi secara aktif berupaya membentuknya (Smith, 2021).

2.1.1. *Belt and Road Initiative* Sebagai Implementasi Kebijakan Luar Negeri Xi Jinping

Implementasi paling nyata dari kebijakan luar negeri China yang baru dan ambisius ini adalah Belt and Road Initiative (BRI), yang diluncurkan oleh Xi Jinping pada tahun 2013. BRI, yang terdiri dari Silk Road Economic Belt dan *21st Century Maritime Silk Road*, merupakan proyek infrastruktur dan investasi global yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah modern. Inisiatif ini bukan sekadar program

bantuan pembangunan, melainkan sebuah strategi global yang bertujuan untuk mengintegrasikan China secara lebih dalam ke dalam ekonomi global, mengatasi kelebihan kapasitas industri domestik, dan mengamankan jalur pasokan energi serta perdagangan (Anam & Ristiyani, 2018).

Inisiatif dari *Belt and Road Initiative* ini merupakan langkah China dalam mengintegrasikan negara-negara yang berada di sekitar daratan China, seperti negara di Asia, Eropa, dan Afrika, untuk saling terkoneksi melalui jalur perdagangan darat yang telah terbangun infrastrukturnya. Hal ini memberikan potensi pembangunan ekonomi bagi negara-negara yang terlibat sekaligus menjadikan China sebagai pusat perekonomian dalam poros tersebut. Hal ini sesuai dengan dokumen strategis "*Vision and Actions on Jointly Building Silk Road Economic Belt and 21st Century Maritime Silk Road*", yang mana menekankan bahwa program ini bertujuan untuk menyelaraskan strategi pembangunan sekaligus menggali potensi di negara-negara yang dilewati oleh jalur tersebut (Zhang & James, 2023).

Kebijakan BRI diterapkan oleh China melalui investasi luar negeri ke beberapa negara di Asia, Eropa, dan Afrika dengan dasar sebagai investasi pembangunan ekonomi negara. Dalam hal ini, pemerintah China mengeluarkan investasi yang besar untuk mendukung inisiatif tersebut. Tercatat, mulai dari tahun 2013 hingga 2018, investasi langsung China dengan negara mitra dalam inisiatif BRI mencapai lebih dari 90 milyar

dolar AS. Tidak hanya itu, pemerintah China juga mencatat bahwa hingga tahun 2020, nilai perdagangan antara China dengan negara mitra BRI mencapai 7,8 triliun dolar AS yang mencakup lebih dari 2000 proyek BRI. Hingga tahun 2020, China melalui BRI telah menjalin hubungan kemitraan dengan 138 mitra negara maupun non-negara yang tersebar dari Eropa hingga benua Australia (Zhang & James, 2023).

Investasi tersebut tidak hanya dialokasikan untuk membangun infrastruktur bagi negara-negara mitra BRI, China juga menyalurkan investasi tersebut untuk membangun infrastruktur komunikasi dan teknologi digital. Inisiatif BRI juga dilakukan melalui proses pertukaran pelajar antara China dengan negara-negara mitra, yang mana murid dari negara mitra disekolahkan di perguruan tinggi di negara tersebut untuk meningkatkan minat terhadap pendidikan di China sekaligus sebagai bentuk transfer teknologi (Zhang & James, 2023).

Signifikansi BRI bagi kebijakan luar negeri China semakin diperkuat ketika inisiatif ini dimasukkan ke dalam Konstitusi Partai Komunis China selama Kongres Nasional ke-19 pada 2017, di mana dokumen tersebut menyatakan bahwa pemerintah China akan mengikuti prinsip untuk mencapai pertumbuhan yang setara melalui diskusi dan komunikasi dalam BRI. Ini menunjukkan komitmen jangka panjang China terhadap BRI sebagai pilar utama kebijakan luar negeri, bukan hanya sebagai inisiatif ekonomi atau proyek infrastruktur semata. BRI telah berkembang menjadi instrumen multidimensional yang mencakup

berbagai aspek, mulai dari infrastruktur hingga pertukaran budaya di berbagai negara di seluruh dunia (Müller et al., 2024).

Secara geopolitik, BRI berfungsi sebagai alat untuk memperluas pengaruh China di kawasan-kawasan strategis, terutama di Asia Tenggara, Asia Tengah, dan Afrika. Hal ini dapat dilihat sebagai strategi global China untuk mengubah cara diplomasi dan penggunaan kekuasaan, khususnya dalam hubungannya dengan AS dan negara-negara Asia, dengan menciptakan ketergantungan ekonomi sehingga meningkatkan daya tawar China. Hal ini membuat China dapat mengambil alih peran kepemimpinan dalam geopolitik Asia, Afrika, serta Eropa dengan memperluas pengaruhnya melalui pembiayaan infrastruktur. Ini menjadi wujud ambisi dari Beijing untuk menantang supremasi Amerika Serikat di kawasan Asia dengan tumbuh sebagai kekuatan ekonomi dunia yang mampu memberikan keuntungan ekonomi bagi negara-negara mitra di kawasan Asia, Afrika, maupun Eropa (Anam & Ristiyani, 2018). Selain itu, inisiatif BRI juga menjadi upaya bagi pemerintah China dalam mengamankan jalur perdagangan sehingga keuntungan perekonomian melalui perdagangan China dapat dimaksimalkan dengan terbangunnya infrastruktur maupun pengaruh yang dimiliki oleh Beijing terhadap negara-negara mitra (Zhang & James, 2023).

2.1.2. *Periphery Diplomacy* Sebagai Strategi Kemitraan Strategis

Kebijakan luar negeri China di bawah pemerintahan Xi Jinping juga ditandai dengan munculnya langkah *periphery diplomacy* sebagai

kebijakan diplomasi China. Melalui *periphery diplomacy*, China melakukan reorientasi prioritas strategis menuju kawasan negara tetangga China. Pada Oktober 2013, Xi Jinping menetapkan bahwa fokus utama kebijakan luar negeri China harus diarahkan pada penguatan hubungan dengan negara-negara tetangga. Reorientasi ini dilakukan dalam konteks meningkatnya ketegangan hubungan China dengan Amerika Serikat dan persepsi meningkatnya ancaman eksternal. Xi Jinping menekankan bahwa China harus menjalin lebih banyak kemitraan strategis sebanyak mungkin dan memupuk kesadaran tentang "*Community of Common Destiny*" di negara-negara tetangga untuk menciptakan lingkungan eksternal yang kondusif bagi pencapaian "*China Dream*" (Wang & Hoo, 2016).

Strategi *periphery diplomacy* mencakup upaya untuk mengintegrasikan negara-negara tetangga ke dalam ekosistem ekonomi yang dipimpin China melalui kerjasama ekonomi dan investasi infrastruktur. Dengan membangun kemitraan ekonomi menjadi lebih erat dan saling ketergantungan menjadi lebih besar, China berusaha mengurangi kemungkinan negara-negara tetangga untuk menentang kepentingan China dalam isu-isu penting seperti sengketa maritim dan klaim teritorial. Pendekatan ini juga dirancang untuk mengkomunikasikan bahwa konfrontasi dengan China akan merugikan mitra ekonomi mereka, sementara kooperasi akan memberikan manfaat bersama. Wilayah Asia Tenggara, khususnya ASEAN menjadi fokus utama dari strategi *periphery diplomacy* ini, dengan semua sepuluh anggota ASEAN berpartisipasi

dalam BRI dalam dekade pertama sejak pertama kali proyek tersebut diinisiasi (Hu, 2024).

2.1.3. Pendekatan Asertif China di Masa Xi Jinping

Di sisi lain, pemerintah China juga memiliki pendekatan yang tegas dalam kebijakan luar negerinya di bawah pemerintahan Xi Jinping. China secara terbuka berani dalam menantang hegemoni Amerika Serikat dalam kontestasi hegemoni global. Hal ini ditunjukkan dari upaya China dalam berupaya untuk merebut kekuasaan di Taiwan agar berada di dalam kedaulatan Beijing. Pemerintah China secara terbuka meningkatkan potensi adanya eskalasi konflik militer di Selat Taiwan untuk menganeksasi Taiwan. Hal ini ditambah dengan adanya wacana reunifikasi China yang merujuk pada menyatunya Taiwan terhadap Beijing sebagai bagian dari *China Dream*. Selain itu, China juga secara terbuka mengatasi simpatisan maupun aktivis pro kemerdekaan Taiwan dengan cara kekerasan dan pemberian label kelompok separatis untuk menekan suara maupun opini terkait dengan penolakan integrasi Taiwan terhadap China (Jie, 2024).

Di sisi lain, eksistensi Taiwan memiliki peranan penting bagi Amerika Serikat. Taiwan memiliki peranan strategis bagi pemerintah Amerika Serikat maupun dunia barat berkat geografinya yang berada di wilayah Pasifik, yang mana secara lebih spesifik, Taiwan berada di antara China dan dua negara mitra Amerika Serikat yaitu Jepang dan Korea Selatan. Hal ini menjadikan Taiwan sebagai negara yang tepat untuk

menjaga *balance of power* di wilayah Asia Pasifik dengan membendung penempatan militer China di wilayah tersebut (Jie, 2024). Selain itu, Taiwan juga berperan sebagai strategis sebagai salah satu negara produsen teknologi terbesar di dunia dan memiliki peranan penting dalam rantai pasokan global. Hal ini membuat eksistensi Taiwan menjadi penting untuk memastikan terjaganya pasokan global, khususnya di bidang teknologi (Bellocchi, 2023). Oleh karena itu, sikap China yang secara terbuka berupaya menganeksasi Taiwan sebagai bagian dari China merupakan langkah tegas dari Beijing untuk menantang hegemoni Amerika Serikat. Terlebih, Xi Jinping secara konsisten menegaskan kembali tujuan reunifikasi sebagai hal yang tak terhindarkan dan tidak dapat ditawar-tawar, dan tidak mengesampingkan penggunaan kekuatan untuk mencapai tujuan tersebut (Jie, 2024). Peningkatan frekuensi dan skala latihan militer tentara China di sekitar Taiwan, terutama setelah kunjungan pejabat Amerika Serikat, menunjukkan bahwa isu Taiwan kini menjadi risiko konflik regional yang serius.

Selain Taiwan, China juga memiliki sikap yang tegas atas klaim wilayah teritorialnya di Laut China Selatan. Di Laut China Selatan, China telah secara agresif memajukan klaimnya atas hampir seluruh perairan tersebut melalui pembangunan pulau buatan atau pulau reklamasi dan militerisasi dengan penguatan personel militer maritim. Langkah ini dilandaskan oleh klaim dari Beijing yang menyatakan bahwa kedaulatan China secara geografi didasarkan pada *nine-dash line* yang mencakup

hingga wilayah Asia Tenggara. Klaim tersebut kemudian ditentang oleh banyak negara karena dinilai tidak ada landasan hukum yang sah atas klaim tersebut dan menyalahi wilayah kedaulatan dari negara lain (Sinaga, 2016). Tindakan ini secara langsung menantang klaim negara-negara ASEAN lainnya, seperti Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei, serta kebebasan navigasi internasional.

Di sisi lain, sengketa ini juga menjadi wujud dari perubahan arah kebijakan luar negeri China yang bersifat asertif. Puncak dari asertivitas ini adalah penolakan China terhadap putusan *Permanent Court of Arbitration* (PCA) tahun 2016, yang menyatakan bahwa klaim China atas *nine-dash line* tidak memiliki dasar hukum. Penolakan ini menunjukkan kesediaan China untuk mengabaikan hukum internasional ketika dianggap bertentangan dengan kepentingan kedaulatan intinya, sebuah ciri khas dari kebijakan luar negeri Xi Jinping (Hidayat et al., 2024). Selain itu, China juga melakukan berbagai aktivitas militer dalam memperkuat klaimnya terhadap Laut China Selatan sebagai bagian dari politik luar negerinya. Hal ini dilakukan China dengan melakukan latihan militer secara aktif di Laut China Selatan, ditambah dengan patroli polisi maritim maupun pasukan militer di wilayah laut tersebut (Sinaga, 2016). Kemudian, China juga secara diplomatik berupaya mempertegas hubungan kemitraannya dengan negara-negara di sekitar Laut China Selatan, yang mana Beijing memberikan ultimatum terhadap Filipina dengan tidak menoleransi sikap

Filipina yang menjalin hubungan diplomatik lebih erat dengan Amerika Serikat (Jie, 2024).

Dari sikap-sikap tersebut, dapat dilihat bahwa Kebijakan luar negeri China di bawah Xi Jinping mengalami transformasi yang bersifat proaktif dan asertif. Konsolidasi kekuasaan pribadi Xi memungkinkan restrukturisasi aparat diplomasi, dengan penekanan pada *China Dream* sebagai visi rejuvenasi nasional yang mengintegrasikan ambisi ekonomi-militer. *Belt and Road Initiative* menjadi instrumen utama diplomasi, didukung dengan penguatan hegemoni China melalui klaim terhadap Laut China Selatan dan Taiwan yang diredam dengan narasi China sebagai negara yang membantu negara-negara berkembang.

2.2 Persepsi Global Terhadap Pemerintah China di Masa Pemerintahan Xi Jinping

Periode 2013 hingga 2023, yang bertepatan dengan masa kepemimpinan Xi Jinping, ditandai oleh perubahan dramatis dalam persepsi publik global terhadap China di bawah pemerintahan Xi Jinping. Survei Pew Research Center menunjukkan bahwa sejak Xi Jinping menjabat sebagai Presiden, pendapat publik di negara-negara maju mengalami perubahan yang signifikan, yang mana pada awalnya, persepsi terhadap China memiliki pandangan yang relatif ambivalen atau bahkan positif di awal dekade menjadi pandangan yang sangat negatif, terutama di kalangan negara-negara maju. Hal ini dibuktikan dari pada awal pemerintahan Xi Jinping, China masih dipandang secara positif di negara-

negara Asia dan Afrika, yang mana China dilihat sebagai kekuatan ekonomi yang memberikan peluang (Silver et al., 2023). Persepsi ini kemudian mulai berubah menjadi pandangan negatif terhadap China, yang mana mayoritas responden memiliki persepsi yang negatif terhadap China . Pergeseran ini merupakan respons langsung terhadap kebijakan luar negeri China yang semakin asertif dan manifestasi filosofi diplomatik yang lebih konfrontatif di masa pemerintahan Xi Jinping (Kuang & Hearn-Branaman, 2025).

Salah satu pola yang paling menonjol dalam persepsi internasional terhadap China adalah perbedaan signifikan antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Eropa, Australia, Jepang, dan Korea Selatan, pandangan negatif terhadap China telah menjadi dominan dan terus meningkat seiring waktu. Sebaliknya, di negara-negara berkembang, khususnya di Afrika sub-Sahara dan beberapa bagian Asia-Pasifik, pandangan terhadap China tetap lebih positif atau setidaknya lebih pragmatis. Di negara Afrika sub-Sahara seperti Kenya, Nigeria, dan Afrika Selatan, serta di Indonesia, mayoritas atau pluralitas penduduk memiliki kepercayaan terhadap Xi Jinping sebagai alternatif dari hegemoni yang saat ini dikuasai oleh Amerika Serikat (Silver et al., 2023).

Beragamnya persepsi masyarakat internasional terhadap China, yang mana mayoritas memiliki persepsi negatif, didasarkan pada beberapa faktor. Inisiatif BRI yang mendorong investasi besar-besaran Beijing ke

berbagai negara berkembang diikuti pula dengan munculnya perusahaan-perusahaan asing milik China yang membangun bisnis di negara penerima investasi. Situasi ini mendorong adanya sentimen bahwa China akan mengambil alih bisnis dan lapangan pekerjaan yang ada di negara penerima investasi sehingga mengancam mata pencaharian lokal. Tidak hanya itu, situasi ini juga mendorong munculnya sentimen China yang melakukan eksploitasi di negara berkembang sehingga menurunkan kesejahteraan masyarakat lokal yang terdampak dari adanya investasi tersebut (Karibayeva, 2020).

Tidak hanya itu, langkah kebijakan luar negeri China dengan investasi melalui BRI juga menuai respons yang negatif, yang mana masyarakat di negara penerima investasi merasa bahwa China justru memberikan beban finansial yang berat bagi negara penerima. Kekhawatiran terhadap BRI mencakup beberapa dimensi. Pertama, dimensi keamanan ekonomi terkait dengan "*debt-trap diplomacy*," di mana negara penerima dikhawatirkan akan jatuh ke dalam jerat utang yang tidak berkelanjutan kepada China, yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk kepentingan geopolitik China. (García-Herrero, 2025). Selain itu, kekhawatiran masyarakat internasional terhadap BRI juga dipengaruhi oleh kondisi geopolitik dan pengaruh China secara global, yang mana banyak persepsi bahwa BRI digunakan untuk meningkatkan posisi daya tawar China di hadapan negara lain sebagai timbal balik atas investasi infrastruktur skala besar di berbagai negara (Zhang & James, 2023).

Persepsi publik terhadap China juga dengan kuat diasosiasikan dengan bagaimana China menjalankan kebijakan luar negerinya. Kebijakan China dalam klaim terhadap Laut China Selatan dan eskalasi aktivitas militer di Selat Taiwan mendorong munculnya opini negatif terhadap China yang justru berpotensi menjadi penyebab konflik skala global akibat keputusan geopolitik yang dinilai tidak menjaga perdamaian. Selain itu, China juga selalu dikaitkan dengan ancaman terhadap demokrasi secara global, yang mana ini merujuk pada kebijakan pemerintah China di bawah Xi Jinping yang berupaya membungkam berbagai opini oposisi, salah satunya seperti kelompok pro kemerdekaan Taiwan. Hal ini ditambah juga sikap asertif dari pemerintah China yang mendorong memburuknya opini publik terhadap China (Edney & Turcsányi, 2024). Di sisi lain, negara-negara berkembang cenderung mempertahankan pandangan yang lebih pragmatis, yang mana ini terjadi karena China dipandang sebagai mitra pembangunan yang menawarkan investasi infrastruktur tanpa syarat politik yang ketat, terutama melalui BRI. Meskipun demikian, terdapat juga perubahan menuju sentimen negatif dari negara-negara berkembang atas dominasi China (García-Herrero, 2025).

Kebijakan China juga mendapatkan respons kebijakan dari negara-negara barat yang bertransformasi dari bersifat strategi keterlibatan menjadi strategi kompetisi dan de-eskalasi risiko. Salah satunya diakibatkan dari adanya persepsi ancaman dari China di Asia Pasifik.

Aspek regional dari respons internasional terhadap China sangat jelas terlihat di kawasan Asia-Pasifik, di mana persepsi ancaman China telah meningkat secara dramatis sejak awal era Xi Jinping. Sengketa Laut China Selatan menjadi sumber kekhawatiran regional, dengan China melakukan reklamasi lahan berskala besar di kawasan yang diperdebatkan. Tindakan ini dipersepsikan oleh negara-negara tetangga tindakan asertif dari China yang meningkat dan kesediaan untuk menggunakan kekuatan militer untuk menegakkan klaim teritorialnya (Dunford & Liu, 2024).

Persepsi ancaman di Asia-Tenggara mencerminkan dinamika yang kompleks. Negara-negara ASEAN memiliki kepentingan ekonomi yang signifikan dengan China melalui perdagangan dan investasi. Namun pada saat yang sama mereka memiliki kekhawatiran keamanan yang mendalam tentang klaim China di Laut China Selatan dan implikasi strategis dari kekuatan militer China yang terus meningkat. Hal ini membuat persepsi ancaman China di Asia Tenggara tetap ada meskipun telah ada peningkatan dalam kerjasama pertahanan bilateral antara China dan negara-negara ASEAN (Kwok, 2020). Di sisi lain, Jepang dan Korea Selatan juga menunjukkan peningkatan dalam persepsi ancaman terhadap China. Jepang melihat kenaikan dalam ketegangan dengan China terkait sengketa Kepulauan Senkaku dan meningkatkan investasi pertahanan sebagai upaya *balance of power* terhadap Beijing. (Yamaguchi, 2016).

Amerika Serikat juga merespons kebangkitan China melalui transisi perubahan sikap terhadap Beijing. Sebelum tahun 2016, Amerika

Serikat berupaya menyeimbangkan pengaruh China melalui strategi "*Pivot to Asia*" yang berfokus pada penguatan aliansi dan kemitraan regional. Upaya ini mencakup inisiatif ekonomi seperti *Trans-Pacific Partnership* (TPP), yang dirancang untuk menetapkan standar perdagangan tinggi di kawasan tanpa melibatkan China. Dengan ini, Amerika Serikat dapat membendung dominasi China dalam perdagangan dan ekonomi di kawasan Asia Pasifik sekaligus mempertahankan hegemoni Gedung Putih dalam menjaga pengaruhnya di kawasan Asia (Campbell, 2016). Namun, pergeseran yang lebih dramatis terjadi di bawah pemerintahan Trump, yang secara eksplisit melabeli China sebagai pesaing strategis dan meluncurkan perang dagang yang melibatkan pengenaan tarif besar-besaran terhadap barang-barang China (Kuang & Hearn-Branaman, 2025). Hal ini menandai meningkatnya eskalasi konflik dari hubungan antara Amerika Serikat dengan China, yang mana berpotensi memperlebar konflik dari perang dagang menuju konflik geopolitik seperti ketegangan di Taiwan dan Laut China Selatan.

Di masa pandemi Covid-19, pemerintah Amerika Serikat juga melabeli China sebagai pelaku utama yang menyebabkan pandemi. Secara retorika, persepsi pemerintah dan masyarakat Amerika Serikat membentuk sentimen negatif terhadap China akibat pandemi Covid-19 yang diawali di negara tersebut. Hal ini diperparah dengan adanya anggapan bahwa pemerintah China menutupi kondisi penyebaran virus yang justru berdampak pada meluasnya penyebaran Covid-19 (Li, 2021). Respons

Amerika Serikat juga diwujudkan melalui penguatan aliansi keamanan, salah satunya dengan pembentukan AUKUS (Australia, United Kingdom, United States) pada September 2021 merupakan langkah paling signifikan dalam respons keamanan Amerika Serikat sebagai *deterrence* di wilayah Asia Pasifik dan membendung pengaruh China (Edney & Turcsányi, 2024).

Respons lain juga diberikan oleh Uni Eropa. Uni Eropa, yang secara tradisional memandang China terutama melalui lensa ekonomi, juga mengalami perubahan mendasar dalam pendekatannya. Respons Uni Eropa didorong oleh kekecewaan terhadap praktik perdagangan China yang tidak adil, isu hak asasi manusia, dan kurangnya timbal balik dalam hubungan bilateral. Pada tahun 2019, Uni Eropa melabeli China sebagai mitra kerja sama, pesaing ekonomi, dan rival sistemik. Penunjukan "rival sistemik" ini merupakan pengakuan bahwa sistem politik otoriter China menantang nilai-nilai demokrasi dan tata kelola global berbasis aturan yang dianut oleh Uni Eropa (Politi, 2023). Selain itu, Uni Eropa juga merespons ketergantungan ekonomi yang berlebihan terhadap China melalui strategi *de-risking* sebagai respons atas skeptisme Eropa terhadap China. Peningkatan skeptisisme Eropa terhadap China didorong oleh beberapa faktor. Pertama, ketidakseimbangan perdagangan yang berkelanjutan antara Eropa dan China telah meningkat selama dekade terakhir, menciptakan kekhawatiran tentang keadilan pertukaran ekonomi dan akses pasar. Kedua, kekhawatiran tentang hak asasi manusia di China,

khususnya di Xinjiang dan Tibet, telah menjadi isu yang semakin menonjol dalam diskursus Uni Eropa tentang China. Ketiga, kekhawatiran tentang pengaruh China di sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, teknologi, dan pertahanan telah mendorong Uni Eropa untuk mewujudkan mekanisme pengawasan investasi yang lebih ketat (Bandemer et al., 2025). Upaya *De-risking* mencerminkan upaya Uni Eropa untuk menyeimbangkan kepentingan ekonominya dengan kekhawatiran keamanan nasional, memastikan bahwa ketergantungan ekonomi tidak dapat dimanfaatkan oleh China untuk tujuan politik atau koersif.

Dari respons-respons tersebut, dapat dilihat bahwa kebijakan luar negeri China di bawah Xi Jinping telah memicu pergeseran strategis yang signifikan di seluruh dunia, terutama di negara-negara Barat dan Asia-Pasifik. Transformasi persepsi internasional terhadap China yang ditandai dengan meningkatnya pandangan negatif di negara maju dan skeptisisme terhadap BRI, menciptakan dilema strategis bagi Beijing. Kritik tajam atas tindakan asertif China di Laut China Selatan, kekhawatiran debt-trap, dan persepsi ideologis tentang sistem otoritatif China memicu respons negatif dari pemerintah negara lain maupun masyarakat global (Li, 2021).

Respons defensif awal China terbukti tidak efektif menghadapi narasi "*China threat*" yang dominan di Barat. Persepsi publik global menunjukkan penurunan tajam citra China, mencapai titik terendah historis di banyak negara maju. Lingkungan eksternal yang semakin bermusuhan ini, yang dipersepsikan oleh Beijing sebagai upaya kolektif

untuk menahan kebangkitannya, menciptakan dilema strategis. Dalam pandangan Beijing, kritik dan penolakan ini menuntut respons yang lebih tegas dan vokal untuk membela kepentingan nasional dan kedaulatan. Akibatnya, Beijing beralih ke *Wolf Warrior Diplomacy* sebagai strategi ofensif, yang mana memanfaatkan retorika konfrontatif untuk membela narasi domestik, menyerang kritik sebagai imperialisme Barat dan memobilisasi nasionalisme internal guna mengkonsolidasikan dukungan publik (Yuan, 2023a).

2.3 *Wolf Warrior Diplomacy* Sebagai Kebijakan Luar Negeri China

Wolf Warrior Diplomacy merupakan gaya komunikasi para diplomat resmi China yang bersifat keras, konfrontatif, dan tidak lagi tunduk pada kelaziman diplomatik yang cenderung lunak dan ambigu sebagai gaya diplomasi secara verbal (Jonathan Sullivan & Wang, 2023). Oleh karena itu, *Wolf Warrior Diplomacy* hadir sebagai pendekatan yang lebih proaktif dan ofensif dalam merespons kritik terhadap kebijakan China. Hal ini tercermin dalam perubahan nada dan substansi diplomasi yang mencerminkan transformasi konseptual dalam cara China memandang posisi dan perannya dalam tatanan global.

Wolf Warrior Diplomacy tumbuh dari kerangka besar *daguo waijiao* atau "diplomasi negara besar", sebuah konsep yang menekankan bahwa China tidak hanya perlu berhubungan dengan negara-negara besar, tetapi juga harus berperilaku dan bertindak layaknya sebuah negara besar (Jonathan Sullivan & Wang, 2023). Didukung dengan visi Xi Jinping

tentang "*Chinese Dream*" (*Zhongguo Meng*), yang berpusat pada "Peremajaan Besar Bangsa China" (*Great Rejuvenation of the Chinese Nation*) (Ferdinand, 2016). Dalam hal ini, China melihat pentingnya upaya aktif dalam membangun kekuatan diskursif dalam politik global untuk meningkatkan kapasitas komunikasi internasional. Oleh karena itu, *Wolf Warrior Diplomacy* menjadi salah satu instrumen untuk mewujudkan ambisi tersebut, yakni dengan cara menetapkan agenda secara proaktif dan memenangkan opini publik internasional sebelum pihak lain berhasil mendefinisikan narasi tentang China (Jonathan Sullivan & Wang, 2023).

Wolf Warrior Diplomacy sendiri lahir dari akumulasi dan tekanan struktural dari domestik maupun luar negeri. Secara domestik, Xi Jinping secara eksplisit mendorong para diplomat untuk lebih agresif dalam memperjuangkan kepentingan China, memperkuat pengawasan melalui Komisi Urusan Luar Negeri Pusat, dan menjadikan keberanian bersikap konfrontatif sebagai sinyal loyalitas terhadap kepemimpinan partai. Sedangkan itu, kritik asing juga menjadi salah satu tekanan struktural yang mendorong tumbuhnya nasionalisme siber di kalangan publik China menciptakan tekanan sosial yang menuntut pemerintah bersikap lebih tegas dalam menghadapi kritik dari pihak asing. Hal ini membuat para diplomat semakin terdorong untuk mengadopsi *wolf warrior* sebagai bentuk responsivitas terhadap ekspektasi publik domestik (Jonathan Sullivan & Wang, 2023).

2.4 Negara Target *Wolf Warrior Diplomacy* 2019-2023

Melihat dari persepsi global terhadap pemerintah China di masa pemerintahan Xi Jinping, pemerintah China menargetkan penerapan *Wolf Warrior Diplomacy* dalam memengaruhi opini publik sekaligus memperkuat posisi China secara global. Pada dasarnya, ada tiga negara yang menjadi sasaran dari upaya *Wolf Warrior Diplomacy* China di masa pemerintahan Xi Jinping pada tahun 2019-2023. Ketiga negara tersebut, antara lain Amerika Serikat, Australia, dan Swedia (Lim, Ito, & Zhang, 2025). Ketiga negara tersebut menjadi sasaran utama atas sikap dari pemerintah negara maupun masyarakat yang dinilai memutarbalikkan fakta menurut pemerintah China.

Amerika Serikat turut menjadi sasaran dari upaya diplomasi ini. Hubungan China–Amerika Serikat dalam periode 2019–2023 diwarnai oleh eskalasi sengketa yang bersifat multidimensi, mencakup bidang perdagangan, teknologi, hak asasi manusia, dan geopolitik. Akar dari ketegangan ini berasal dari perang dagang yang dimulai pada masa pemerintahan Trump pada 2018, ketika Washington memberlakukan tarif terhadap produk-produk impor dari China. Antara 2018 hingga 2022, Amerika Serikat memberlakukan tarif terhadap barang-barang China senilai sekitar USD 550 miliar (Council on Foreign Relations, n.d). Selain itu, kedua negara juga bersaing di sektor teknologi, khususnya terkait Huawei. Pada 2019, Amerika Serikat memasukkan Huawei dan sejumlah perusahaan China lainnya ke dalam *Entity List* yang melarang mereka

memperoleh chip dan perangkat lunak buatan AS. Langkah ini didasari tuduhan bahwa infrastruktur Huawei dapat digunakan sebagai alat pengawasan oleh pemerintah Beijing. Persaingan teknologi semakin meruncing ketika pemerintahan Biden pada Oktober 2022 mengeluarkan kontrol ekspor yang melarang penjualan semikonduktor dan peralatan manufakturnya kepada perusahaan-perusahaan China (Wu, 2024). Selain itu, pandemi COVID-19 menjadi pemicu sengketa bilateral yang intens. Ketegangan AS-China mengalami lonjakan signifikan pada 2019 akibat kenaikan tarif AS atas impor China, dan kembali meningkat tajam pada 2020 ketika AS menyudutkan China atas asal-usul COVID-19 (Yuan, 2023).

Australia turut menjadi target dari implementasi *Wolf Warrior Diplomacy*, ketegangan hubungan kedua negara semakin meningkat ketika Australia menjadi negara Barat pertama yang melarang Huawei berpartisipasi dalam jaringan 5G-nya dengan alasan keamanan nasional. Kemudian pada tahun 2020, ketika Perdana Menteri Scott Morrison menyerukan investigasi internasional yang independen atas asal-usul COVID-19 yang diarahkan ke China. China merespons dengan pembatasan perdagangan, kebijakan boikot produk, dan antidumping. Ketegangan semakin diperburuk oleh sejumlah perkembangan strategis lainnya. Pada Agustus 2021, Australia mengumumkan rencana besar untuk memperoleh kapal selam bertenaga nuklir dari Amerika Serikat, sebuah perkembangan signifikan dalam strategi pertahanannya, ditambah dengan

kemitraan AUKUS yang ditafsirkan Beijing sebagai ancaman langsung terhadap China di kawasan pasifik (He & Feng, 2025).